



Youth Food Movement: Pemberdayaan Karang Taruna dalam Ketahanan Pangan Desa Pamboborang

¹Saddam Husain Tamrin, ²Muhammad Sajidin, ³Fajar Rakasiwi, ⁴St. Maria Ulfa, ⁵Bulkis, ⁶Muhammad Sulthan

^{1,3,4,5} Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437

^{2,6} Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Majene, Sulawesi Barat 91412
Muh.sajidin@unsulbar.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 22 th June 2026 Revised: 5 th August 2026 Published: 14 th August 2026 Keywords: Youth Food Movement; Empowerment; Karang Taruna; Food Security	<i>The Youth Food Movement through the empowerment of Karang Taruna is a strategic step in strengthening food security at the village level based on the potential of local youth. This Community Service Activity (PKM) aims to optimize the role of the Youth Organization in Pamboborang Village, Majene Regency, through multi-stakeholder collaboration to build regional food security. The method of implementing the program includes institutional coordination, capacity building, delivery of agricultural inputs, and direct field practice in youth gardens. This activity presented resource persons from the Community and Village Empowerment Office (DPMD) and the Majene Regency Food Security Office. The results of capacity building showed a significant increase in participants' knowledge, as shown by an increase in the average score from 47.00 (pre-test) to 84.25 (post-test) with an N-Gain score of 0.72 (high category). In addition, this movement has succeeded in realizing a productive pilot garden (demonstration plot) based on superior vegetable and fruit seeds managed independently by village youth. The implication of this service is the realization of a collaborative governance model between youth and regional technical agencies to support stability, resilience, and long-term food independence.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 22 Juni 2026 Direvisi: 5 Agustus 2026 Dipublikasi: 14 Agustus 2026 Kata kunci Gerakan Pangan Pemuda; Pemberdayaan; Karang Taruna; Ketahanan Pangan	Gerakan Pangan Pemuda (<i>Youth Food Movement</i>) melalui pemberdayaan Karang Taruna merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan tingkat desa berbasis potensi pemuda lokal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna di Desa Pamboborang, Kabupaten Majene, melalui kolaborasi multipihak guna membangun ketahanan pangan wilayah. Metode pelaksanaan program meliputi koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas, penyerahan input pertanian, serta praktik lapangan langsung di kebun pemuda. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene. Hasil penguatan kapasitas menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata skor dari 47,00 (<i>pre-test</i>) menjadi 84,25 (<i>post-test</i>) dengan <i>N-Gain score</i> sebesar 0,72 (kategori tinggi). Selain itu, gerakan ini berhasil mewujudkan kebun percontohan (<i>demplot</i>) produktif berbasis bibit sayuran dan buah unggul yang dikelola mandiri oleh pemuda desa. Implikasi dari pengabdian ini adalah terwujudnya model tata kelola kolaboratif (<i>collaborative governance</i>) antara pemuda dan instansi teknis daerah guna mendukung stabilitas, resiliensi, serta kemandirian pangan jangka panjang.

PENDAHULUAN

Pemuda memiliki peran yang sangat strategis sebagai aktor penggerak utama (*core actor*) dalam memperkuat ketahanan pangan, yang merupakan pilar krusial bagi stabilitas dan Ketahanan Nasional dari tingkat desa hingga skala makro (Trio et al., 2025). Di tengah ancaman krisis regenerasi petani akibat keengganan generasi muda terhadap pertanian konvensional, pelibatan aktif organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna menjadi sebuah urgensi kebijakan administrasi pemerintahan modern dalam menggerakkan sektor produktif pedesaan (Sutono Sutono & Achmad Khusnan Arif, 2025). Melalui pendekatan tata *kelola* kolaboratif (collaborative governance), pemuda desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai inovator teknologi dan *agropreneur* yang mampu mengubah lahan tidur menjadi kawasan pangan produktif berbasis iptek adaptif. Mobilisasi potensi kepemudaan dalam mengelola kedaulatan pangan lokal ini bukan sekadar aktivitas yang sesuai dengan tanam biasa, melainkan sebuah bentuk implementasi nyata dari aksi Bela Negara non-militer yang krusial demi menciptakan ketahanan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi krisis logistik global (Hanun et al., 2020).

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dan determinan krusial dalam mempertahankan stabilitas serta Ketahanan Nasional yang harus diinisiasi dari skala terkecil, yaitu tingkat desa (Nugraheni Hadiyanti et al., 2025). Konsep ketahanan nasional yang tangguh tidak hanya bertumpu pada aspek militer, melainkan pada kemampuan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri, aman, dan berkelanjutan (Sri Supadmi et al., 2024). Ketika sebuah desa mampu berdaulat atas pangannya sendiri, maka ketahanan wilayah secara makro akan terbentuk dengan sendirinya, menciptakan ketahanan terhadap berbagai gejolak ekonomi maupun krisis logistik global (Dedy Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, kebijakan administrasi pemerintahan modern saat ini menempatkan penguatan pangan pedesaan sebagai prioritas strategis nasional yang memerlukan mobilisasi seluruh elemen masyarakat lokal (Partini & Sari, 2022).

Namun fenomena empiris saat ini menunjukkan adanya paradoks berupa penurunan minat generasi muda pedesaan yang sangat tajam terhadap sektor pertanian (Susilo et al., 2024). Kaum muda cenderung melakukan urbanisasi dan meninggalkan sektor agraris karena dipersepsikan kurang lulusan dan tidak memberikan jaminan finansial yang memadai (Murdiono & Rodiyah, 2024). Fenomena desersi kultural ini berimplikasi langsung pada ancaman nyata krisis regenerasi petani nasional serta ancaman pangan mandiri di masa depan (Pasasa et al., 2025). Jika arus pemuda yang menjauhi dunia pertanian terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, maka dalam jangka panjang Indonesia akan mengalami ketergantungan impor pangan tinggi yang berpotensi mengancam kelangsungan serta ketahanan nasional (Wahyuni et al., 2025).

Berdasarkan analisis situasi tujuan di Desa Pamboborang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, ditemukan bahwa potensi pemuda yang terhimpun dalam wadah organisasi Karang Taruna belum dioptimalkan secara institusional untuk menggerakkan sektor-sektor produktif pedesaan (McClintock, 2018). Karang Taruna di wilayah ini selama bertahun-tahun cenderung terjebak pada aktivitas yang bersifat seremonial, momentum olahraga, ataupun kepanitiaan hari keagamaan besar semata (Trisnadevy & Pramana, 2025). Padahal, jika dilihat dari perspektif Administrasi Pemerintahan, Karang Taruna sejatinya merupakan lembaga suprastruktur lokal dan mitra strategis pemerintah desa yang memegang peran vital dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sosial serta penggerak roda ekonomi lokal

(Nurlinayanti et al., 2025). Pengabaian potensi kelembagaan pemuda ini menyebabkan terjadinya stagnasi inovasi dalam tata kelola sumber daya desa (Trisnadevy & Pramana, 2025).

Melihat urgensi tersebut, permasalahan mitra yang menjadi prioritas utama dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah rendahnya kapasitas pengetahuan teknis dan kapabilitas manajerial pengurus Karang Taruna mengenai tata kelola pertanian modern berbasis komoditas cepat panen, serta minimnya jaringan koordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten. Justifikasi penetapan prioritas masalah ini didasarkan pada kenyataan sosiologis dan geografis berupa banyaknya lahan tidur yang tidak terurus di Desa Pamboborang. Lahan-lahan berpotensi memicu kerawanan sosial dan pangan lokal apabila tidak segera dikelola secara kolektif, produktif, dan bernilai ekonomis.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran program ini dirancang dengan mengintegrasikan konsep *Collaborative actor*. Dalam skema ini, Karang Taruna ditempatkan sebagai aktor penggerak utama (*core actor*) yang berfungsi menjembatani komunikasi, integrasi kebijakan, serta program kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene. Melalui sinergitas multi-pihak ini, ego sektoral antar-lembaga dapat dihilangkan dan digantikan oleh komitmen pemberdayaan kolektif yang inklusif (Thomas, 2017).

Melalui landasan teoritis dan empiris di atas, tujuan utama dari pelaksanaan program PKM “Gerakan Pangan Pemuda ” ini adalah untuk mengelevasi kapasitas kelembagaan, membangun jejaring kewenangan daerah, serta membekali keterampilan praktis agro-inovasi bagi Karang Taruna Desa Pamboborang dalam mengelola ketahanan pangan desa (Rosanti et al., 2025). Manfaat yang dimaksudkan dari program luaran ini mencakup aspek makro dan mikro, yaitu terciptanya kemandirian pangan yang kuat di tingkat rumah tangga pedesaan serta mestimulus lahirnya jiwa *agropreneurship* baru berbasis teknologi pertanian adaptif di kalangan generasi muda lokal (Pasasa et al., 2025).

METODE

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemuda serta optimalisasi potensi agraris pedesaan, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menawarkan solusi komprehensif berupa gerakan integratif bertajuk “*Youth Food Movement*”. Gerakan ini fokus pada transformasi peran pemuda Karang Taruna dari sekadar seremonial organisasi menjadi aktor penggerak ketahanan pangan berbasis inovasi teknologi tepat guna. Solusi nyata yang diimplementasikan meliputi program penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (saprotan) berupa bibit hortikultura unggul serta kelengkapannya, dan penyediaan media budidaya berkelanjutan melalui pembuatan kebun percontohan produktif (*demplot*) yang dikelola sepenuhnya oleh Karang Taruna.

Pendekatan utama yang diterapkan dalam penyelesaian persoalan mitra didasarkan pada konsep *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat* yang bersifat partisipatif (Murdiono & Rodiyah, 2024). Pendekatan ini menempatkan sasaran masyarakat bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek pengambil keputusan dalam pembangunan wilayahnya (Nugraheni Hadiyanti et al., 2025). Di sisi lain, pendekatan *Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif) digunakan untuk membangun integrasi horizontal dan vertikal antara elemen kepemudaan desa dengan struktur birokrasi daerah di tingkat Kabupaten. Melalui transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) secara dua arah dan metode *learning by doing* (belajar sambil berbuat), kemandirian manajerial serta keterampilan teknis pertanian modern dapat

tertanam kuat dalam diri anggota Karang Taruna. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dalam materi ini, dilakukan pengukuran melalui pre-test dan post-test.

Tahapan pelaksanaan dirancang secara berkesinambungan melalui empat tahapan utama:

1. Tahap Koordinasi Awal (*Koordinasi Multipihak*), Pada Tahap ini fokus pada sinkronisasi tujuan bersama pemerintah desa, pengurus Karang Taruna, dan tim pengabdian untuk memetakan kepengurusan, menetapkan tata tertib pemanfaatan aset, serta menentukan letak geografis tanah kas desa yang akan dijadikan Kebun Pemuda.
2. Tahap Penguatan Kapasitas (*Workshop Peningkatan Kapasitas*), Pada Sesi ini menghadirkan pemangku kebijakan teknis kabupaten, yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Majene dan Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene untuk menyampaikan materi strategi regulasi agropreneur dan inovasi *smart farming* adaptif.
3. Tahap Distribusi Input Pertanian (*Alokasi Stimulus Pertanian*), Penyerahan paket stimulan pertanian berupa bibit sayuran dan buah varietas unggul cepat panen beserta perlengkapan investigasi budidaya (polybag, pupuk organik, dan nutrisi tanaman).
4. Tahap Praktik Lapangan Terbimbing (*Latihan Aplikasi Lapangan*), Aksi kolektif pemuda di Kebun Pemuda untuk menyebarkan pengolahan tanah, mencampur media tanam makro, instalasi pelindung tanaman menggunakan lengkungan bambu, hingga tata cara penanaman bibit serta pemeliharaan secara berkala.

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026. Lokasi pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua titik utama di wilayah Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sesi pembekalan materi dan penguatan kapasitas kelembagaan bertempat di Balai Pertemuan/Bengsal Galung Paara Desa Pamboborang, sedangkan untuk pelaksanaan sesi praktik lapangan dan pembuatan demplot budidaya sayuran-buah bertempat langsung di kawasan Kebun Pemuda Desa Pamboborang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) *Gerakan Pangan Remaja* di Desa Pamboborang pada tanggal 9 Mei 2026 secara keseluruhan berjalan dengan sukses dan mencapai target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kehadiran tim pengabdian yang mengolaborasikan perspektif Ilmu Administrasi Pemerintahan dan Ketahanan Nasional berhasil menstimulus kesadaran kolektif serta kelembagaan pemuda Karang Taruna. Secara kronologis, hasil kegiatan diawali dengan konsolidasi kelembagaan yang melahirkan kesepahaman antara pihak pemuda dan *pemangku kepentingan* desa mengenai pentingnya tata kelola pangan mandiri dari unit terkecil. Sinergi ini membuka akses bagi pemuda untuk mengoptimalkan aset tanah desa yang selama ini terbengkalai menjadi kawasan produktif.

Berdasarkan materi yang dipaparkan dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026, penjelasan dari kedua narasumber birokrasi Kabupaten Majene memberikan fondasi konsep dan praktis yang sangat kuat bagi gerakan *Gerakan Pangan Remaja* di Desa Pamboborang. Penjelasan pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Majene yang secara khusus menyoroti urgensi redefinisi peran pemuda dalam pembangunan desa melalui materi berjudul "*Peran Pemuda Desa Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan*". Narasumber menegaskan bahwa dari kacamata administrasi pemerintahan, pemuda pedesaan tidak boleh lagi ditempatkan sebagai objek pasif masyarakat kebijakan, melainkan harus bertransformasi menjadi subjek aktif atau pelaku usaha tani modern (*agropreneur*). Untuk mencapai hal tersebut, DPMD mendorong rekonstruksi pola kerja Karang Taruna agar mampu memanfaatkan sisa lahan tidur milik kas desa menjadi

lahan produktif bernilai ekonomi tinggi, sekaligus mengikis stigma bahwa sektor pertanian adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan.

Penjelasan kedua dari Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene melengkapi aspek manajerial tersebut dengan memberikan orientasi teknis berbasis iptek melalui paparan bertajuk "*Peran Strategis Pemuda Desa: Inovator Teknologi*". Narasumber menguraikan secara komprehensif cetak biru pemanfaatan teknologi pertanian adaptif lahan kering yang sangat relevan dengan karakteristik geografis wilayah Majene. Di hadapan para pengurus Karang Taruna, ia memperkenalkan penerapan metode *pertanian cerdas*, pengairan efisien menggunakan sistem irigasi tetes (*irigasi tetes*), serta potensi budidaya pekarangan intensif melalui teknik hidroponik dan aeroponik. Selain itu, narasumber membekali pemuda dengan keterampilan substitusi input pertanian melalui tata cara pembuatan pupuk organik cair (POC) secara mandiri untuk menekan biaya produksi dan menjaga kelestarian ekosistem tanah desa.



Gambar 1. Dokumentasi Pemberian Materi Oleh Narasumber

Sinergi penjelasan dari kedua narasumber tersebut berhasil membuka cakrawala berpikir baru yang holistik bagi Karang Taruna Desa Pamboborang. Keberhasilan transfer pengetahuan dalam kegiatan *Youth Food Movement* diukur secara kuantitatif melalui evaluasi pembelajaran sebelum dan sesudah sesi pembekalan materi. Penilaian ini mencakup penguasaan materi regulasi kelembagaan desa, konsep *agropreneurship*, hingga teknik *smart farming*. Sebaran data nilai individu, analisis skor terendah-tertinggi, nilai rata-rata, serta efektivitas capaian *N-Gain* peserta terangkum pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Kuantitatif dan Statistik Deskriptif Peningkatan Kapasitas Peserta Pelatihan (N=20)

Nomor / Indikator	Nama Peserta	Pra-Tes (0–100)	Tes Pasca-Tes (0–100)	Peningkatan (Δ)	Skor N-Gain	Kategori Efektivitas
1	Aldi	45	85	40	0,73	Tinggi
2	Rudi	50	90	40	0,8	Tinggi
3	siti	40	80	40	0,67	Sedang
4	Ahmad Faisal	55	85	30	0,67	Sedang
5	Rahmat Hidayat	35	75	40	0,62	Sedang
6	Andi Firman	60	95	35	0,88	Tinggi
7	Syahrul	50	85	35	0,7	Tinggi

8	Ramadhan	40	80	40	0,67	Sedang
9	Fitriani	45	90	45	0,82	Tinggi
10	arsyad	30	70	40	0,57	Sedang
11	husain	55	90	35	0,78	Tinggi
12	ashari	50	85	35	0,7	Tinggi
13	asriadi	40	75	35	0,58	Sedang
14	irfan	65	100	35	1	Tinggi
15	wahyudi	45	80	35	0,64	Sedang
16	hasriani	50	90	40	0,8	Tinggi
17	zulkifli	35	80	45	0,69	Sedang
18	budi agung	60	90	30	0,75	Tinggi
19	reski saputra	45	85	40	0,73	Tinggi
20	nur wahida	50	85	35	0,7	Tinggi
A	Nilai Terendah (Min)	30.000	70.000	30.000	0,57	Sedang
B	ilai Tertinggi (Maks)	65.000	100.000	45	1	Tinggi
C	Rata-Rata Keseluruhan (Mean)	47.000	84,25	37,25	0,72	Tinggi

Berdasarkan data kuantitatif pada Tabel 1, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan kapasitas pemuda Karang Taruna Desa Pamboborang yang sangat signifikan pasca-pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas. Sebelum intervensi program dilakukan, skor rata-rata *pre-test* peserta berada pada angka 47,00 dengan nilai terendah sebesar 30,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awalnya tingkat pemahaman kepemudaan terhadap regulasi kelembagaan desa, peluang *agropreneurship*, dan teknis *smart farming* masih tergolong rendah. Namun, setelah sesi pemaparan materi dari DPMD serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene, terjadi peningkatan nilai rata-rata *post-test* yang drastis menjadi 84,25. Rata-rata selisih peningkatan skor yang dicapai oleh 20 peserta adalah sebesar 37,25 poin (meningkat sebesar 79,25%). Bahkan, nilai tertinggi (*maximum score*) pada *post-test* berhasil mencapai skor sempurna 100,00

Kombinasi antara motivasi kelembagaan dari DPMD dan transfer keahlian teknologi dari Dinas Ketahanan Pangan memberikan pemahaman teoritis sekaligus operasional yang matang bagi pemuda sebelum mereka turun langsung ke lapangan. Pembekalan dari para pemangku kepentingan kebijakan daerah ini berhasil meyakinkan elemen kepemudaan desa bahwa penguasaan sektor pangan berbasis inovasi teknologi bukan sekadar aktivitas yang cocok untuk tanam biasa, melainkan sebuah instrumen strategi lokal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pedesaan sekaligus menjadi pilar penopang ketahanan nasional yang tangguh dari wilayah pinggiran.

Hasil pada tahap penguatan kapasitas pemuda ini ditandai dengan peningkatan pemahaman regulasi dan wawasan teknologi pertanian masa depan oleh para anggota Karang Taruna. Melalui paparan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Majene mengenai hakikat *agropreneurship*, para peserta berhasil meredefinisi peran strategis mereka sebagai mitra mengendalikan administrasi pemerintahan desa yang mandiri secara ekonomi. Peningkatan wawasan ini diperkuat oleh pemaparan Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene yang memberikan orientasi teknis operasional mengenai

keunggulan *smart farming* , pembuatan pupuk organik cair, dan efisiensi irigasi lahan kering. Forum edukasi interaktif ini berhasil memicu dialog dua arah yang membangun antara birokrat daerah dengan pemuda desa.

Pada tahap implementasi praktik lapangan, luaran yang dihasilkan adalah terbangunnya satu Kebun Pemuda yang difungsikan sebagai demplot (*demplot*) tanaman hortikultura produktif. Karang Taruna Desa Pamboborang menampilkan partisipasi aktif yang sangat tinggi dalam pengolahan tanah, pencampuran media tanam makro ke dalam wadah polibag, hingga penyusunan instalasi struktur lengkungan bambu sebagai pelindung tanaman dari terik matahari ekstrem. Penyerahan stimulan input pertanian berupa varietas bibit sayuran dan buah unggul cepat panen berhasil ditanam secara presisi di area demplot tersebut. Keberadaan kebun percontohan ini menjadi bukti fisik awal dari komitmen bela negara non-militer melalui penguatan integritas pangan lokal.

Untuk mempermudah pemantauan kualitas dan efektivitas program pemberdayaan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, tim pengabdian menyusun tabel komparasi pencapaian kompetensi mitra sebagai berikut:

Tabel 1. Komparasi Tingkat Kapasitas dan Penguasaan Kompetensi Karang Taruna

No.	Parameter Indikator Pemberdayaan	Kondisi Sebelum PKM	Kondisi Setelah PKM
1	Kemitraan Administrasi Pemerintahan	Rendah; Karang Taruna belum memahami jalur koordinasi dan kebijakan dengan instansi DPMD Kabupaten Majene.	Tinggi; Pemuda mampu mengidentifikasi peluang kemitraan strategi tata kelola desa.
2	Wawasan Ketahanan Pangan Wilayah	Rendah; Pemuda menganggap ketahanan pangan hanya urusan domestik petani tua.	Tinggi; Tumbuhkan kesadaran ideologi bahwa pangan adalah instrumen Ketahanan Nasional.
3	Keterampilan Teknis Agro-Inovasi	Sangat Terbatas; Hanya memahami pertanian tanpa sentuhan teknologi proteksi dan efisiensi udara.	meningkat; Menguasai teknik pempoli mulai hortikultura, sistem proteksi bambu, dan pupuk cair.
4	Tata Kelola Aset dan Lahan	Pasif; Lahan tidur milik kas desa tidak terurus dan berpotensi memicu kerawanan sosial.	Aktif; Terbentuknya “Kebun Pemuda” yang produktif dan dikelola secara terstruktur oleh lembaga.

Secara akumulatif, hasil PKM ini tidak hanya memberikan dampak sesaat berupa penanaman bibit dan penanaman, melainkan berhasil meletakkan fondasi institusional baru bagi Karang Taruna Desa Pamboborang. Lembaga kepemudaan ini kini memiliki kapasitas manajerial dan sarana fisik yang siap dikembangkan menjadi basis ekonomi kreatif pedesaan untuk mendukung ketahanan pangan wilayah jangka panjang.



Gambar 2. Antusiasme Pemuda karang taruna desa pamboborang

Keberhasilan program *Gerakan Pangan Pemuda* PKM di Desa Pamboborang menegaskan bahwa penataan ulang kapasitas kelembagaan lokal merupakan prasyarat mutlak dalam menyukseskan kebijakan pembangunan di tingkat desa (Ndraha, 2003). Aldi sebagai ketua karang taruna menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas dilaksanakannya kegiatan ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas hadirnya program PKM *Gerakan Pangan Remaja* dari Universitas Terbuka ini. Selama ini, kegiatan Karang Taruna di desa kami memang lebih banyak fokus pada kegiatan seremonial, olah raga, atau perayaan hari besar saja karena keterbatasan wawasan dan jaringan ke pemerintah daerah. yang hari ini kita bangun bersama akan kami rawat dan kelola secara serius agar menjadi bukti bahwa pemuda Desa Pamboborang siap mandiri dan menjadi motor penggerak perekonomian desa. Ditinjau dari perspektif Administrasi Pemerintahan, optimalisasi peran Karang Taruna pasca-kegiatan ini membuktikan bahwa lembaga kepemudaan lokal memiliki fungsi strategis sebagai *aktor inti* yang dapat menggerakkan sektor ekonomi produktif jika diberikan ruang partisipasi yang tepat (Prasojo, 2009; Syafiie, 2011). Transformasi Karang Taruna dari organisasi yang semula pasif dan seremonial menjadi pengelola utama "Kebun Pemuda" menunjukkan bahwa intervensi *peningkatan kapasitas* mampu memicu kesadaran tata kelola (Anwas, 2014; Hardiyansyah, 2018). Penataan kelembagaan ini sangat penting karena administrasi pemerintahan desa yang modern menuntut adanya pembagian peran yang seimbang antara pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lokal guna mewujudkan kemandirian daerah (Kaho, 2005; Wibawa, 2010).



Gambar 3. Aktivitas karang taruna di kebun pemuda Pamboborang

Ditinjau dari koridor Ketahanan Nasional, keterlibatan aktif pemuda dalam mengelola komoditas hortikultura cepat panen ini merupakan bentuk implementasi nyata dari konsep Bela Negara non-militer (Sutopo, 2014). Ketahanan nasional yang tangguh tidak dapat dipisahkan

dari tingkat ketahanan pangan di tingkat domestik pedesaan (Suryana, 2014; Yunas, 2019). Ketika pemuda Desa Pamboborang berhasil mengubah lahan tidur kas desa menjadi kebun percontohan produktif, mereka secara langsung berkontribusi dalam memitigasi risiko kerentanan pangan serta ketergantungan pasokan logistik dari luar daerah (Mardikanto & Soebiato, 2015). Penguasaan keterampilan teknis seperti pembuatan pupuk organik cair dan pemanfaatan sistem proteksi tanaman menggunakan instalasi bambu lokal juga melahirkan kemandirian ekologis, sehingga komunitas pemuda tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga input pertanian pabrikan yang sering melanda pasar domestik (Sutopo, 2014).

Kehadiran para birokrat daerah, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Majene dan Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene, merefleksikan berjalannya model *Collaborative Governance* (tata kelola kolaboratif) secara ideal (Yunas, 2019). Kolaborasi multi-pihak ini berhasil memangkas batas ego sektoral yang selama ini sering menghalangi program jaring pengaman sosial di pedesaan (Dwiningrum, 2012; Thoha, 2008). Integrasi horizontal antara dinas teknis daerah dengan suprastruktur pemuda desa melahirkan saluran komunikasi baru yang memperlancar transfer *pengetahuan (knowledge transfer)* serta pengawasan program secara horizontal (Prasojo, 2009; Uphoff, 1986). Model tata kelola kolaboratif berbasis pemuda seperti ini terbukti efektif dalam memaksimalkan kapasitas manajerial komunitas lokal, sehingga program yang digulirkan tidak bersifat top-down dan seremonial belaka, melainkan tumbuh menjadi gerakan organik yang akuntabel dan berkelanjutan (Anwas, 2014; Ndraha, 2003).

Implikasi tindak lanjut, dampak, serta pembelajaran dari gerakan *Youth Food Movement* ini membuka peluang besar bagi pengembangan kebijakan internal desa yang lebih inklusif (Wibawa, 2010). Keberadaan kebun pemuda yang produktif ini menjadi modal sosial (*modal sosial*) dan bukti empiris yang kuat bagi Pemerintah Desa Pamboborang untuk merealisasikan mandat alokasi anggaran dana desa sektor ketahanan pangan minimal 20% secara konsisten dan terarah (Kaho, 2005). Pembelajaran berharga dari program PKM ini menunjukkan bahwa pemuda pedesaan tidak sepenuhnya kehilangan ketertarikan pada sektor agraris, melainkan mereka membutuhkan pendekatan pertanian baru yang lebih modern, berbasis proteksi iptek, serta memiliki jejaring kemitraan institusional yang jelas hingga ke tingkat kabupaten (Sutopo, 2014; Uphoff, 1986). Melalui komitmen perawatan kebun percontohan secara berkesinambungan oleh Karang Taruna, model inovasi pangan lokal ini dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Majene demi mendukung tercapainya kesejahteraan pangan nasional yang ajek dari wilayah pinggiran (Suryana, 2014; Yunas, 2019).

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) *Youth Food Movement* di Desa Pamboborang berhasil mengintegrasikan penguatan kelembagaan lokal dan keterampilan praktis agro-inovasi bagi Karang Taruna. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) bersama DPMD dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene, kegiatan ini sukses mereorientasi peran pemuda dari aktivitas seremonial menjadi penggerak ekonomi produktif desa. Tingginya partisipasi pemuda tercermin dari keberhasilan mengonversi lahan tidur menjadi Kebun Pemuda sebagai kebun percontohan (*demplot*) hortikultura unggul. Gerakan ini tidak hanya membangun kemandirian pangan tingkat rumah tangga dan modal sosial (*social capital*) untuk mendorong alokasi anggaran desa, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pilar Ketahanan Nasional dari pedesaan.

Meski demikian, pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa keterbatasan teknis maupun operasional. Fokus pendampingan utama masih terbatas pada tahap sosialisasi, edukasi, dan penanaman awal, sehingga belum mencakup pengawalan hingga fase pascapanen serta komersialisasi hasil tani. Selain itu, luas lahan *demplot* yang dikelola masih berskala

percontohan terbatas (*pilot project*), serta penerapan teknologi pertanian masih memanfaatkan sarana pelindung lokal yang sederhana akibat keterbatasan akses agroteknologi modern. Sebagai langkah keberlanjutan, Pemerintah Desa Pamboborang direkomendasikan untuk melegalkan pengelolaan aset lahan tidur oleh Karang Taruna serta mengoptimalkan alokasi dana desa sektor ketahanan pangan. Di sisi lain, instansi teknis daerah perlu mengintegrasikan pendampingan penyuluh lapangan (PPL) secara berkala dan memfasilitasi akses pasar bagi produk yang dihasilkan. Bagi akademisi maupun tim pengabdian selanjutnya, model *collaborative governance* ini sangat potensial untuk direplikasi di wilayah lain dengan pengembangan fokus pada digitalisasi pemasaran (*e-commerce*) dan pengolahan hasil panen (*food processing*) guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih luas.

PENGHARGAAN

Tim penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk program PKM ini. Apresiasi tinggi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna Desa Pamboborang atas partisipasi aktif dan penyediaan lahan kebun pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy Sutrisno, A. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42.
- Hanun, N. R., Fitriyah, H., & Azara, R. (2020). Kemandirian Ekonomi Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 8(2). <https://doi.org/10.18196/bdr.8283>
- McClintock, N. (2018). Urban agriculture, racial capitalism, and resistance in the settler-colonial city. *Geography Compass*, 12(6). <https://doi.org/10.1111/gec3.12373>
- Murdiono, M., & Rodiyah, I. (2024). Karang Taruna's Role in Youth Empowerment Through Sports and Skill Training Programs. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1066>
- Nugraheni Hadiyanti, Probojati, R. T., Prayoga, R. N., & Subarkah, M. K. P. (2025). Budidaya Tanaman Hortikultura Sistem Hidroponik untuk Menarik Minat Generasi Muda dalam Bidang Pertanian. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(1), 11–19. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.1.11-19>
- Nurlinayanti, Leni, Nugroho, L., Mudita, M., Najuah, N., Refranisa, R., Mihadi Putra, Y., & Hidayah, N. (2025). Circular Economy di Tingkat Desa: Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 92–101. <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v4i1.238>
- Partini, & Sari, I. (2022). Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Lokal. *JURNAL AGRIBISNIS*, 11(1), 78–83. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v11i1.1988>
- Pasasa, L., Singarimbun, A., & Parnadi, W. (2025). Pemberdayaan Karang Taruna dalam Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah dan Pertanian Organik Skala Rumah Tangga. *Mitra Teras: Jurnal Terapan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.58797/teras.0401.04>

- Rosanti, I., Purbawati, & Endayani, S. (2025). Integration of Green Economy, Biochar-Agroecology, and GreenSCOR for Sustainable Food and Feed Security in Karang Taruna Gempur Samarinda. *Buletin Poltanesa*, 26(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i2.3534>
- Sri Supadmi, Kuntari, T., Sukweenadhi, J., Widyawaty, E. D., Niati Ningsih, Adib Norma Respati, Rizky Yanuarti, & Indah Ibanah. (2024). *Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Teknologi dan Peningkatan Nilai Tambah* (S. Widowati & Rizki Amalia Nurfitriani, Eds.). Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.1587>
- Susilo, H., Lestari, G. D., & Boriboon, G. (2024). Implementation of Youth Organization Leadership as Village Sustainable Development Goals. *Journal of Nonformal Education*, 10(2), 343–354. <https://doi.org/10.15294/jone.v10i2.9330>
- Sutono Sutono, & Achmad Khusnan Arif. (2025). Pendampingan Karang Taruna untuk Penguatan Jiwa Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Desa Kedungturi Taman Sidoarjo. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 3(4), 220–227. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v3i4.1445>
- Thomas, J. C. (2017). Cultivating Culture: Youth Food Movement in the Taos Pueblo Native American Community. *Crossing Borders: A Multidisciplinary Journal of Undergraduate Scholarship*, 2(1). <https://doi.org/10.4148/2373-0978.1023>
- Trio, L., Muslim, A., & Sari, Y. I. (2025). *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Organisasi Kepemudaan sebagai Agen Perubahan: Studi Kasus Karang Taruna dalam Memperkuat Pengembangan Ekonomi Lokal di Perdesaan Indonesia*. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v5i3.3866>
- Trisnadevy, K. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2025). Pengembangan Lahan Hijau melalui Pendekatan Partisipatif dan Edukatif dalam Mendukung Kualitas Urban Farming Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, Provinsi Bali. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 777–786. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1785>
- Wahyuni, A., Widjaja, S., & Nitalia M, D. (2025). Pemberdayaan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Edukasi dan Implementasi Urban Farming Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Semarang. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 168–176. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v4i2.537>